



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Laporan ini memiliki arti strategis yang khusus karena disusun pada masa transisi perencanaan, yang menjembatani capaian akhir Renstra 2021-2026 dengan peletakan fondasi awal bagi Renstra 2025-2029. Melalui laporan ini, BPBD berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada periode sebelumnya menjadi landasan kuat bagi akselerasi target pembangunan lima tahun ke depan yang lebih responsif dan akuntabel.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan dan Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 07 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA,

dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002





RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”

MISI

MISI Ke- 4 RPJMD

“Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Yang Terintegrasi”

MISI Ke- 5 RPJMD

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui

NOTIFIKASI :
Tercapai
Tidak Tercapai

- I. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
- II. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - a. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
 - b. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat
 - c. Meningkatnya penanganan pasca bencana
 - d. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi



- 1. Indeks Ketahanan Daerah IKD) = 0,66 (100)
- 2. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana = 99,51%
- 3. NILAI AKIP Perangkat Daerah = 81,24 (A)
Baseline LHE AKIP Triwulan IV Tahun 2025



- a. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana = 100%



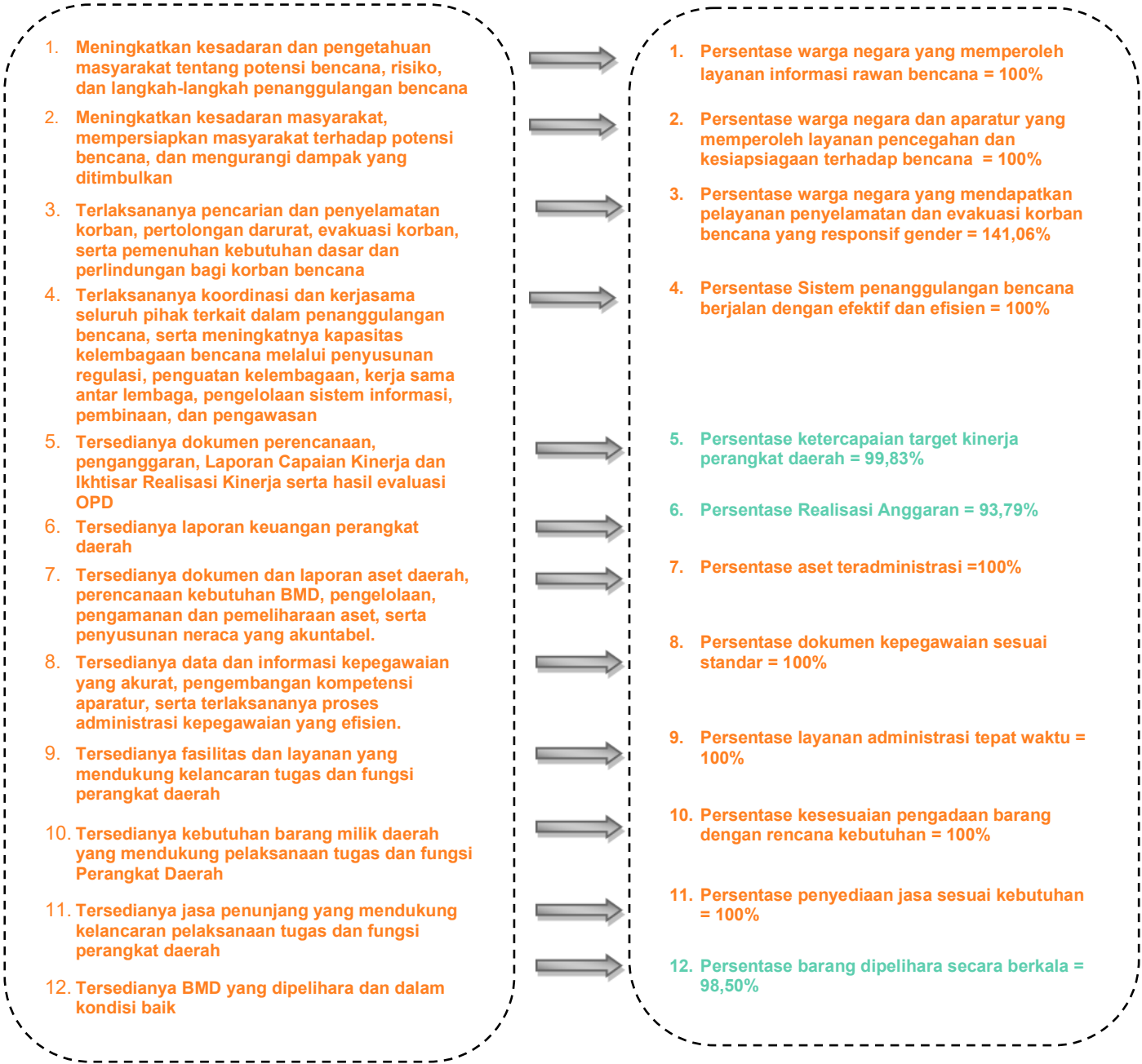
- b. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana = 100%



- c. Persentase Penanganan Pasca Bencana = 100%



- d. Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar = 99,01 %



DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>vi</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>viii</i>
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Aspek Strategis Organisasi	7
1.5 Permasalahan	5
1.6 Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Target Kinerja tahun 2025-2029	9
1. Visi dan Misi.....	10
2. Indikator Kinerja Sasaran	11
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja	19
BAB IV PENUTUP	94
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

hal.

KATA PENGANTAR.....		
Tabel 1	Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029	13
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	14
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	15
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	18
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 6	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025.....	26
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya	26
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2025 – 2029).....	28
Tabel 9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota.....	29
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	35
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	40
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Mengah (2025-2029).....	41
Target 14	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	43
Tabel 15	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.....	43
Tabel 16	Kendala, permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	44
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	61
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	61
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	63
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	65
Tabel 21	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun sebelumnya.....	66
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2025 - 2029).....	67
Tabel 23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	69
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
Table 25	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung	71

Table 26	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	78
Table 27	Permasalahan Solusi	80

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025....	5
Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	5
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025.....	20
Grafik 4 Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025.....	25
Grafik 5 Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2020 s.d 2025	31
Grafik 6 Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2021 s.d 2025.....	32
Grafik 7 Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana TA.2025.....	38
Grafik 8 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025	49
Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025	64
Grafik 10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	77

HIGHLIGHT BENCANA

2025

GEMPA



Kejadian Gempa Bumi di Kab. Luwu Timur sejak 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 sebanyak 530 kejadian dengan Magnitudo 1,3 s.d 4,5 dan terjadi di 11 Kec. yaitu Malili, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, Wasuponda, Angkona, Wotu, Nuha, Towuti, dan Burau (tidak terdapat korban jiwa).

KEBAKARAN RUMAH

Kejadian Kebakaran Rumah di Kab. Luwu Timur tahun 2025 sebanyak 16 kejadian dan yang terparah adalah Kejadian Kebakaran Rumah di Desa Soroako Kec. Nuha dengan jumlah korban sebanyak 48 Rumah, 141 KK, 457 Jiwa yang terjadi tanggal 27 Agustus 2025.



CUACA EKSTRIM



Kejadian Cuaca Ekstrim di Kab. Luwu Timur tahun 2025 sebanyak 38 kejadian dan yang terparah adalah Kejadian Cuaca Ekstrim di Desa Kalosi Kec. Towuti dengan jumlah korban terdampak 30 unit Rumah, 38 KK, 149 jiwa yang terjadi 17 Oktober 2025.

HIGHLIGHT BENCANA

2025

BANJIR

Kejadian Banjir di Kab. Luwu Timur Tahun 2025 sebanyak 23 kejadian dan yang terbesar adalah Kejadian Banjir di Desa Lagego, Lauwo dan Burau Pantai Kec. Wotu dengan jumlah korban terdampak 125 rumah dengan 125 KK dan 419 jiwa yang terjadi tanggal 10 Juli 2025.



TANAH LONGSOR

Kejadian Tanah Longsor di Kab. Luwu Timur Tahun 2025 sebanyak 14 kejadian yang terjadi di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana 9 kali kejadian (kejadian berulang dilokasi yang sama), Kec. Malili 2 kali kejadian (Desa Harapan dan Tarabbi), Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda 1 kali kejadian dan Desa Tawakua Kec. Angkona 1 kali kejadian.

PENCARIAN ORANG HILANG

Pencarian orang hilang Tahun 2025 sebanyak 8 kejadian dengan korban jiwa sebanyak 3 org (MD) dan 5 org berhasil ditemukan yang terjadi di Kec. Tomoni, Kec. Mangkutana Kec. Burau, Kec. Angkona, Kec. Malil.



KEBAKARAN LAHAN

Kejadian Kebakaran Lahan yang terjadi di Kab. Luwu Timur Tahun 2025 sebanyak 7 kali kejadian akibat pembukaan lahan dan pembakaran sampah.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi strategis, di mana setiap OPD menyelesaikan target akhir periode perencanaan 2021-2026 sekaligus mempersiapkan landasan pacu bagi dokumen perencanaan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini menggambarkan keterkaitan antara kinerja yang dihasilkan pada sisa periode perencanaan sebelumnya dengan upaya awal pencapaian tujuan dan sasaran baru, mencakup evaluasi capaian target indikator kinerja utama (IKU), efisiensi penggunaan anggaran, serta efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengingat posisi tahun ini sebagai tahun transisi, laporan ini menyelaraskan evaluasi atas Renstra 2021-2026 dengan persiapan implementasi Renstra 2025-2029 yang telah disusun berdasarkan mandat [RPJMD/RPJMN] terbaru. Hal ini dilakukan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara capaian kinerja masa lalu dengan proyeksi kebutuhan strategis organisasi di masa mendatang.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

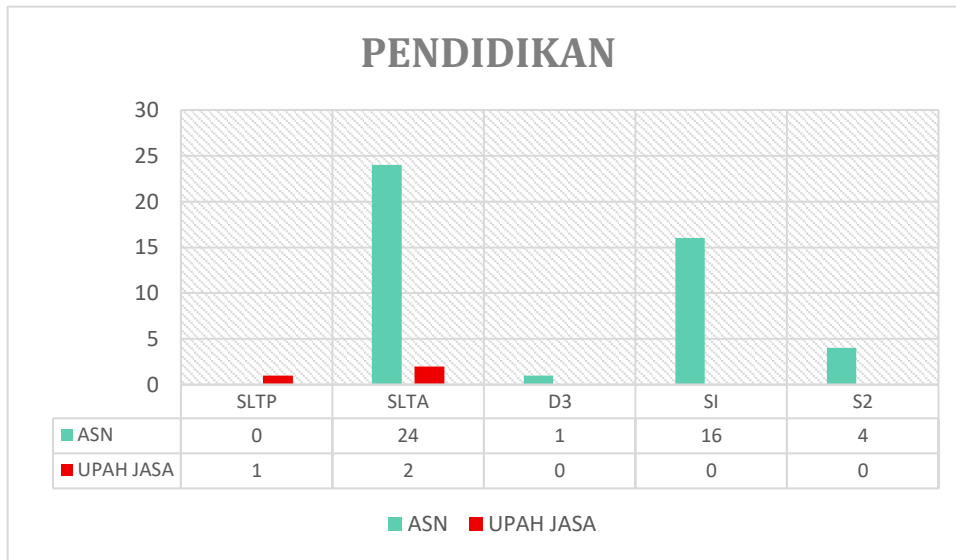
- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

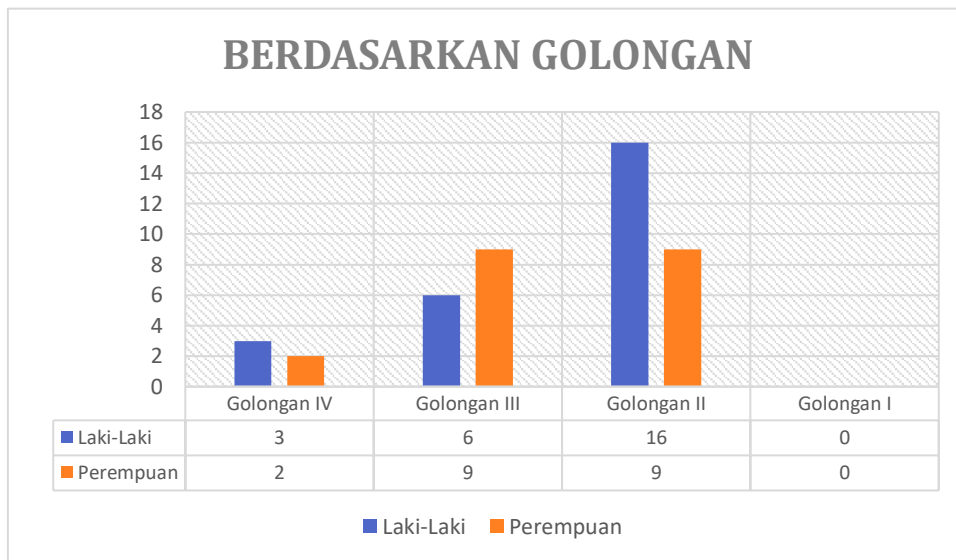
Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 20 orang, PPPK 25 org dan Tenaga Upah Jasa 3 orang (Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 5 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik. 1

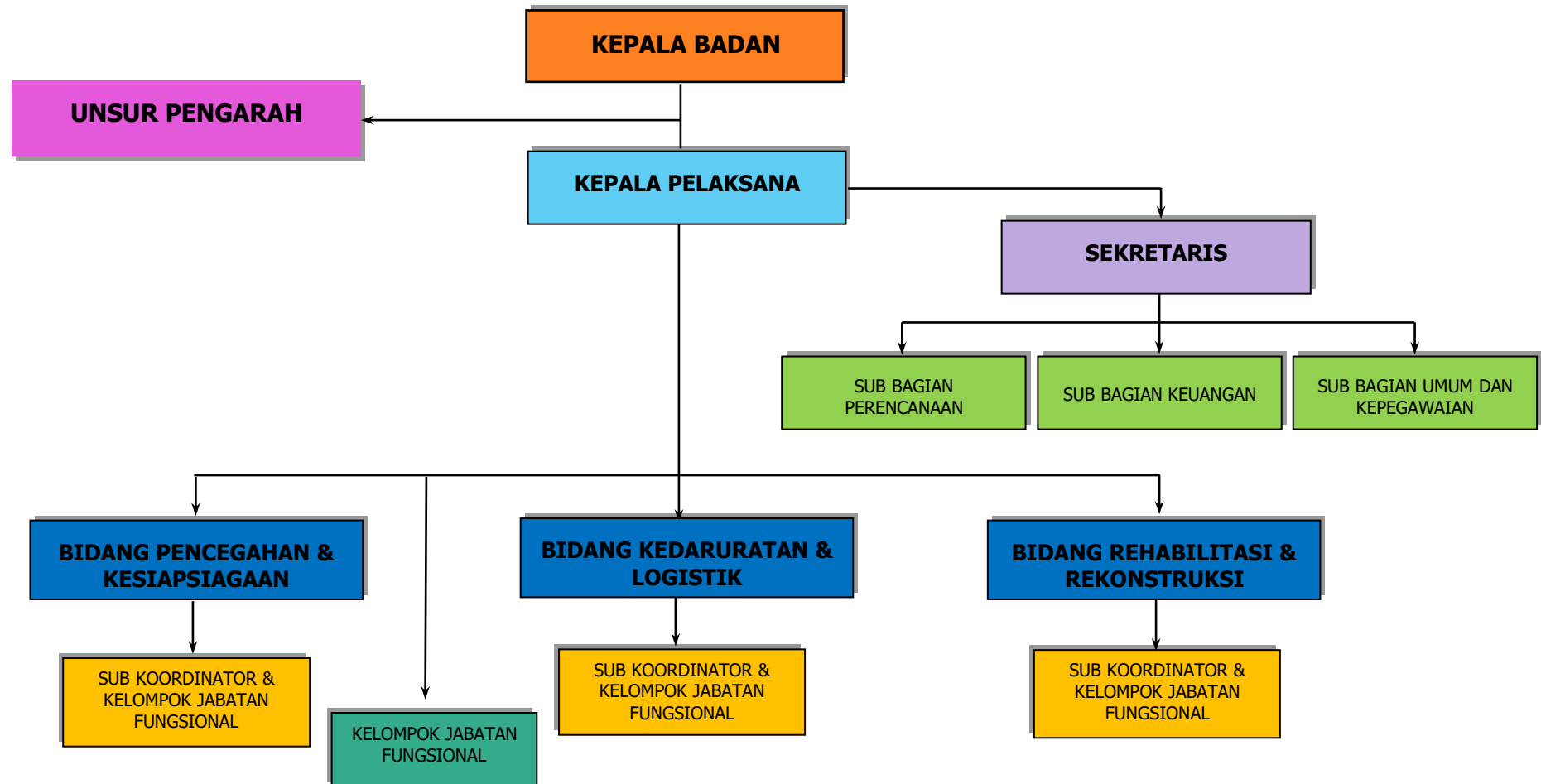
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2025



1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak)** di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB)** di tingkat Kabupaten/ Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

1.5 PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pengolahan data lingkup bidang
2. Keterlambatan proses pengadaan barjas sehingga mempengaruhi realisasi kinerja dan keuangan
3. Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangan dan kinerjanya yang belum maksimal karena sifatnya disediakan
4. Pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada ketersediaan anggaran kas dan rencana aksi
5. Keterlambatan proses penyelesaian administrasi keuangan.

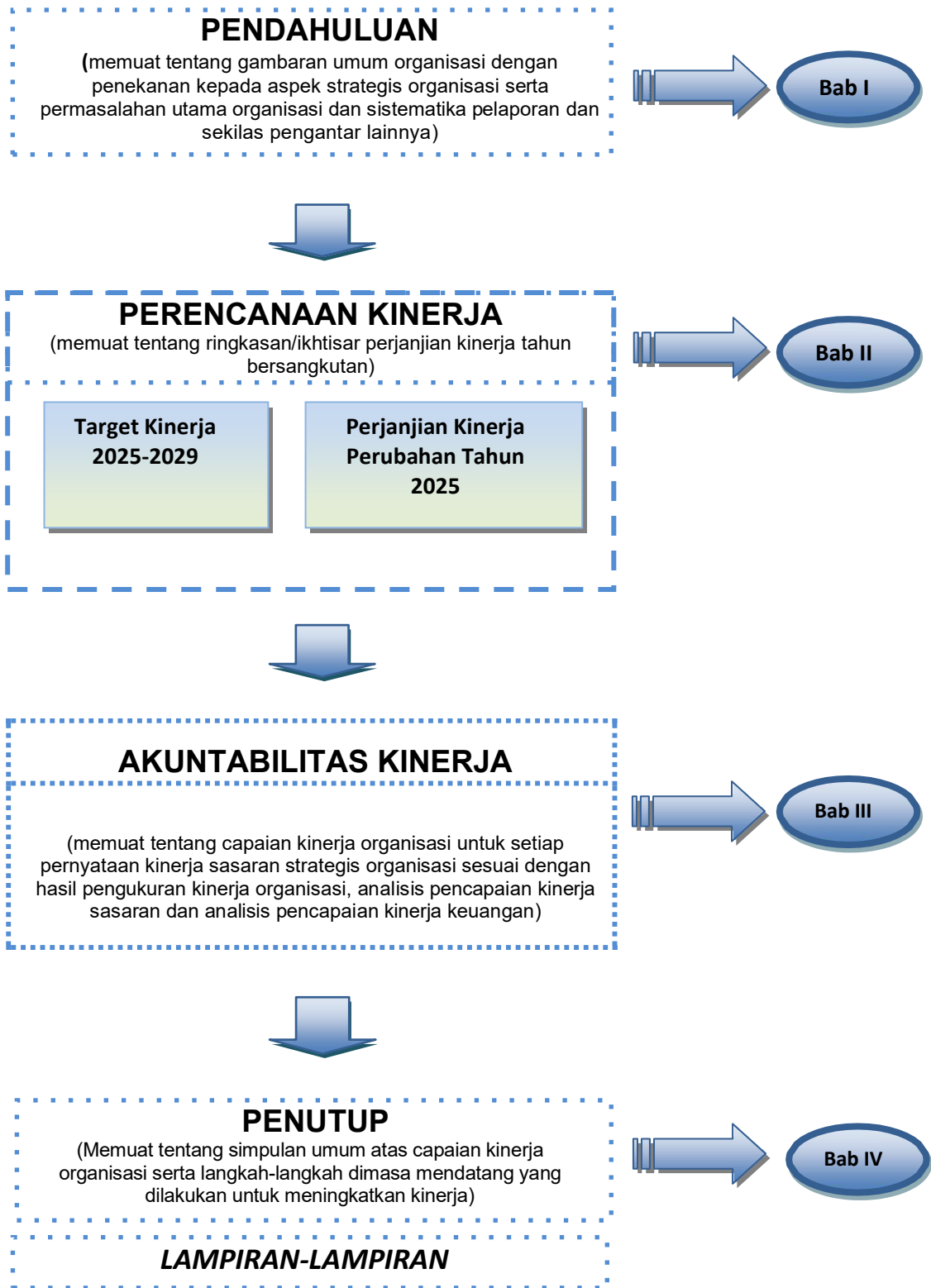
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Tahunan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2025– 2029. Program pada Renstra BPBD periode 2025-2029 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Demikian halnya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, juga mengalami perubahan dan disesuaikan dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pada Dokumen Renstra BPBD 2025-2029, mencakup 1 (satu sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana sedangkan Renstra sebelumnya 2021-2026 terdiri atas (dua) sasaran utama yaitu Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatkan Layanan SPM Sub Urusan Bencana.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2025-2029. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2029 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode Renstra 2021-2026 adalah **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”** sedangkan Visi pada periode Renstra 2025-2029 adalah :

“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”

2. Penyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Kondisi saat ini bahwa terjadi perubahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga OPD terkait termasuk BPBD melakukan penyesuaian terkait hal tersebut. Adapun Misi yang diemban oleh BPBD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur pada periode Renstra 2021-2026 adalah :

- Misi Ke-3 RPJMD yaitu Menyediakan Infra struktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas dengan Sasaran “Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- Misi Ke-4 RPJMD yaitu Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dengan Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Pernyataan Misi pada Periode Renstra BPBD 2025-2029 dengan periode sebelumnya mengalami perubahan, namun masih terkait dengan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

MISI Ke- 4 RPJMD
“Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Yang Terintegrasi”

Sasaran 12 RPJMD
“Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim”

MISI Ke- 5 RPJMD
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”

Sasaran 13 RPJMD
“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah”

1. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran pada Periode Renstra 2021-2026 dan Renstra Periode 2025-2029, terkait Indeks Ketahanan Daerah tidak mengalami perubahan karena masih relevan digunakan dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Kepala Daerah dan merupakan Indikator Kunci Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan ketangguhan dan meminimalisir dampak bencana. Demikian halnya dengan Indikator Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana masih tetap digunakan karena merupakan Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana. Sedangkan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah wajib digunakan karena merupakan instrumen utama untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk memastikan pengelolaan kinerja yang transparan dan berorientasi pada hasil.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2029
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana (IRB)	133,38 (Sedang)	132	130	128	127	126	125	126 (Sedang)
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 (Sedang)	0,66 (sedang)	0,68 (sedang)	0,70 (sedang)	0,72 (sedang)	0,75 (sedang)	0,8 (Tinggi)	0,75 (Sedang)
			Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	67,77 (B)	70,01 (BB)	70,42 (BB)	71,82 (BB)	73,30 (BB)	74,50 (BB)	76,10 (BB)	74,50 (BB)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah mengacu kepada Renstra Periode 2025-2029 namun indikator yang diperjanjikan didalamnya masih sama dengan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Pokok Tahun 2025 yang berdasarkan pada Periode Renstra 2021-2026. Dalam artian bahwa tidak ada perubahan indikator antara Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dengan Perjanjian Kinerja Pokok 2025.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66 (sedang)
		Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76 (BB)



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun transisi sehingga dalam melaporkan akuntabilitas kinerja tahun ini, OPD menggunakan *Mekanisme Penyelarasan (mapping)*. Capaian kinerja pada pada triwulan I, II & III diukur berdasarkan parameter Renstra Lama (2021-2026), sementara progress pada triwulan IV diakselerasi berdasarkan indikator Renstra Baru (2025-2029). Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang telah digunakan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara linier terhadap target organisasi yang terbaru.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66	0,66	100	●
		Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	99,51	99,51	●
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76 (BB)	81,24 (A)	106,8	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

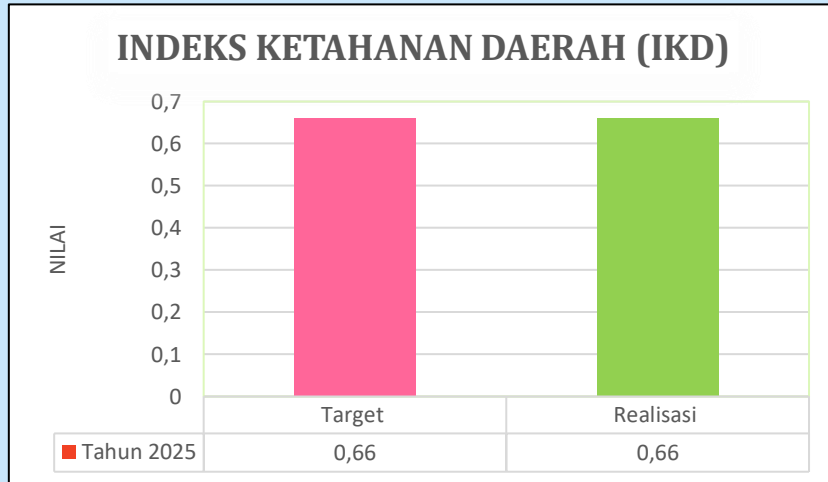
3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

**Sasaran Strategis I
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana**



INDIKATOR 1 : INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)



Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sampai Dengan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan Renstra Periode 2021-2026 dengan Renstra Periode 2025-2029, sehingga terdapat beberapa perubahan mulai dari Visi, Misi, Sasaran, Indikator maupun target kinerja. Meskipun terdapat perubahan indikator dan target, namun perangkat daerah tetap menjamin adanya keselarasan antara visi, misi dan sasaran strategis yang baru. Dan perubahan ini justru memperkuat fokus BPBD dalam Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Olehnya itu Indikator Kinerja Sasaran BPBD pada Renstra 2025-2029 masih sama dengan Renstra 2021-2026 dan tidak mengalami perubahan kecuali target yang menyesuaikan dengan realisasi atau baseline tahun sebelumnya. Hal ini karena indikator tersebut masih relevan untuk digunakan dan merupakan indikator tertinggi dalam penanggulangan bencana.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2025 adalah 0,66 dan realisasi sebesar 0,66 dengan persentase capaian kinerja 100%.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri yang dilaksanakan pada Bulan Nopember melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan Finalisasi yang diikuti oleh OPD terkait. Dalam pelaksanaan FGD didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah dan diperoleh hasil 0,66 (sedang). Hasil penilaian tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi-Selatan, untuk kemudian diverifikasi akhir oleh BNPB pada Bulan Desember 2025. Adapun hasilnya akan dirilis oleh BNPB melalui BUKU IRBI Tahun 2025 yang diterbitkan pada Awal Tahun 2025.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2025 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam **KRB data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme ‘pemutakhiran’ bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan sebesar 0,95, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
 - Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2025-2044
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
 - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
 - Dokumen RPJMD 2025-2029
 - Dokumen Renstra BPBD 2025-2029
 - SK Forum PRB Kabupaten Luwu Timur

- SOP Penyebaran Informasi dan Peringatan Dini Bencana
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur 2025-2029
 - Dokumen RDTR yang berbasis kajian risiko bencana
 - Program/Kegiatan terkait Pengurangan Risiko Bencana pada OPD terkait (Dinas PUPR)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dengan nilai 1, pemenuhannya terdiri dari :
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur 2025-2029
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Kapasitas dalam Kajian Risiko Bencana
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur 2025-2029
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistic sebesar 0,77, yaitu :
- PUSDALOPS BPBD, Website, IG dan WA Penyebaran Informasi Bencana
 - Ketersediaan SOP Pusdalops
 - Pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
 - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD, Dinsos P3A, Dinkes dan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
 - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
 - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
 - SOP Ketersediaan Energi Kebutuhan Darurat Bencana
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana sebesar 0,83 yaitu :
- Penataan Ruang berbasis PRB
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospital Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
 - Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa

5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana sebesar 0,58, yaitu :
 - Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai
 - Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
 - Keberadaan Perda No 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pelaksanaan Restorasi Sungai, Normalisasi Sungai, penguatan lereng, pemantauan kualitas air
 - Penerapan Perda No 15 Tahun 2010 ttg Bangunan Gedung
 - Pembangunan Tanggul, Bronjong, Perkuatan tebing, Pembangunan Bendung Pengendali Banjir
6. Perkuatan kesiapsiagaan & penanganan darurat bencana sebesar 0,58 yaitu :
 - Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
 - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
 - Sosialisasi ke Masyarakat oleh TNI
 - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
 - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
 - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
 - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana sebesar 0,49 yaitu :
 - Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)

- Bantuan Keuangan untuk korban bencana
- SOP Rehabilitasi & Rekonstruksi
- Dokumen R3P

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Untuk Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 masih menggunakan baseline 2024 yaitu 133,38 (risiko sedang) karena Buku IRBI belum dirilis untuk tahun 2025.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”**. IKD dan IRBI menjadi **RAPOR** bagi **Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.**



Grafik. 4

Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Tabel. 6
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,95	0,66	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,83		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,58		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,49		

Sumber Data : BNPB, 2025

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana												Target Tahun 2025
Indikator Kinerja 1	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,44	100 %	0,45	0,60	133,33 %	0,61	0,65	106,5 %	0,66	0,66	100 %	0,66 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat capaian yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan hal yang sangat penting adalah pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah melalui FGD yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2025 sesuai dengan Timeline Penilaian IKD. FGD tersebut melibatkan seluruh OPD terkait. Adapun hasil FGD tersebut kemudian akan diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan verifikasi akhir oleh BNPB pada Bulan Desember tahun 2025 dan hasil yang diperoleh adalah 0,66 dengan predikat sedang. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan didalam dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yang meningkat setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi setiap tahun telah ditindaklanjuti
- b. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dilakukan melibatkan OPD terkait, TNI/POLRI, BUMD/BUM, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) sehingga data pendukung dapat terpenuhi.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan menetapkan Program Penanggulangan sebagai salah satu program prioritas.
- d. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Daerah.
- e. Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026 (periode Renstra 2021-2026), telah melampaui target yang direncanakan. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, sehingga 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur. Akan tetapi Bila dibandingkan dengan target akhir pada periode Renstra 2025-2029, masih perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Hal ini karena telah dilakukan penyesuaian target pada Dokumen Renstra terbaru sesuai dengan realisasi tahun 2024 (Baseline data). Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 – 2029)

Sasaran I :	Meningkatnya Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
Indikator Kinerja 1	Realisasi			
	Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Tahun 2025		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66	0,66	0,75 (sedang)	88%

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak ditetapkan Standar Nasional tetapi hanya score penilaian yaitu 0,01 s.d 0,39 kategori **Rendah**, 0,40 s.d 0,79 kategori **Sedang** dan 0,8 s.d 1 kategori **Tinggi**.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mempunyai Timeline penilaian setiap tahunnya yaitu proses pengumpulan data dan penilaian IKD sampai dengan bulan September, selanjutnya pengumpulan dan Verifikasi IKD bulan Oktober s.d Nopember oleh BPBD Provinsi dan pada bulan Desember dilakukan verifikasi, perhitungan dan publikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 (yang dilakukan oleh BNPB diperoleh Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,66 dengan predikat sedang dari target yang direncanakan sebesar 0,66 dengan persentase capaian kinerja 100%. Nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,379 (sedang) yang merupakan hasil rata-rata nilai IKD dari 21 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi-Selatan. Dan bila dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat I. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPBD Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKD sebagai Indikator Kinerja Utama. Didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Daerah. Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data dan informasi pendukung yang lebih akurat dan lengkap. Adapun perbandingan Nilai IKD pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD TAHUN 2025	NILAI IKD PROVINSI SUL-SEL TAHUN 2025
LUWU TIMUR	0,66	0,379
Luwu Utara	0,50	
Kepulauan Selayar	0,48	
Kota Makassar	0,48	
Bulukumba	0,46	
Barru	0,44	
Wajo	0,44	
Kota Pare-Pare	0,44	
Bone	0,40	
Kota Palopo	0,39	
Luwu	0,39	
Toraja Utara	0,38	
Pinrang	0,32	
Jeneponto	0,30	
Enrekang	0,30	
Soppeng	0,29	
Gowa	0,28	
Pangkajene & Kepulauan	0,28	
Takalar	0,25	
Maros	0,24	
Sidenreng Rappang	0,24	
Sinjai	Tidak menilai	
Tana Toraja	Tidak menilai	
Bantaeng	Tidak menilai	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :
 - Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Risiko Bencana sebagai indikator kinerja utama Kepala Daerah dan Indeks Ketahanan Daerah sebagai indikator utama OPD teknis dalam hal ini BPBD sehingga menjadi lebih fokus dalam pencapaiannya.
 - Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2025) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen R3P, Penyusunan beberapa SOP Rehabilitasi & Rekonstruksi dsb.
- Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD Penilaian IKD.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

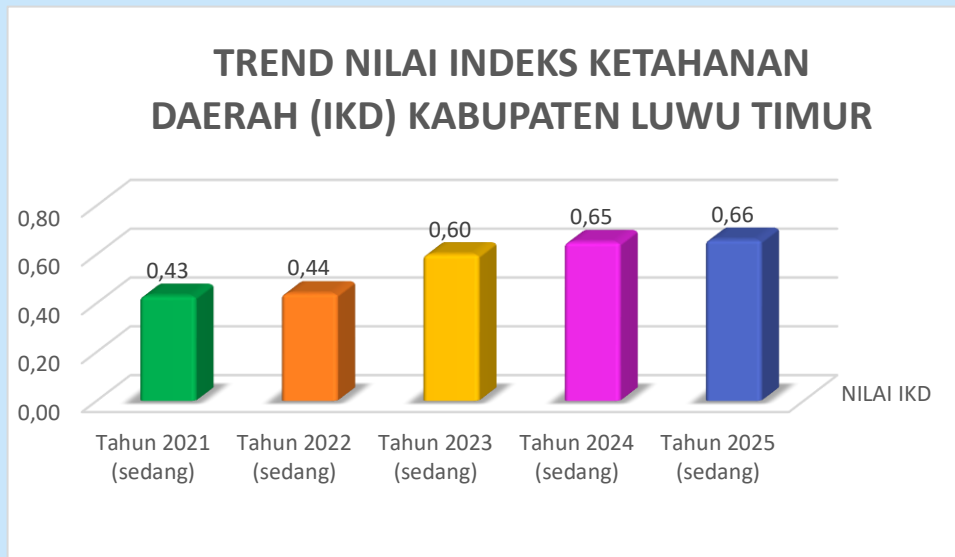
- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline.

❖ **Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana sudah dikatakan efektif atau berhasil, dengan melihat Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya yang dicapai melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya bertumpuh pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait, Akademisi, Dunia Usaha, media dan Masyarakat atau (Pentahelix Kebencanaan).



Grafik 5
Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2020 s.d 2025



Grafik 6
Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2021 s.d 2025

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, terdapat beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik & peralatan penanggulangan bencana, pada tahun 2025, BNPB memfasilitasi logistik korban bencana untuk BPBD Kab. Luwu Timur, daftar bantuan logistik yaitu : Makanan siap saji 50 paket, paket Sembako 100 paket (Beras 5 kg biskuit 4 bks, indomie 5 bks, corned beef 1 klg, sarden besar 1 lg, gula I bks, susu bubuk 1 bks), selimut 100 Lbr, Gygiene Kit 50 paket (**Dewasa** : Pembalut, pampers, sabun mandi, sikat gigi, shampoo, pasta gigi, kapas telinga, deodorant, gunting kuku, sabun cuci piring, detergent, handuk dewasa, handuk kecil, tissue muka, tissue basah, lotion nyamuk, pembersih tangan, kain pel gerah, lap karet, plastik sampah, stiker; **Bayi/Anak-Anak** : minyak telon, sabun bayi, shampoo bayi, sikat gigi, bedak bayi, tissue bayi, pampers sachet, handuk bayi, selimut bayi, perlak bayi, tas kancing tarik), Selimut 100 lbr, Matras 100 lbr, Tenda Pengungsi 2 set, Tenda Keluarga 10 unit, Pompa Alkon 1 unit. Selain itu juga terdapat bantuan logistik dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahap I yaitu : Logistik Pangan 15 paket (Gula pasir, madu, minyak goreng, mie instant, goodie bag, air mineral). Logistik Perlengkapan

Keluarga 15 Paket (Handuk, kain lap handuk, minyak kayu putih, pasta gigi, pembalut Wanita, sabun mandi batang, sarung, shampoo, sikat gigi, goodie bag). Logistik Shelter Kit (terpal) 10 lbr, goodie bag BNPB 20 lbr, masker medis 2000 pcs, selimut 10 lbr, ember 20 buah, matras 5 lbr, velbed 1 unit dan tenda keluarga 1 unit. Setelah itu juga masih terdapat bantuan tahap II terdiri dari : Logistik Pangan 20 Paket (Gula pasir 20 kg, Madu 20 dus, Minyak goreng 20 ltr, Ikan kaleng 20 klg, Goodie Bag 20 lbr, Air mineral 30 dus, Mie Instant 30 dus), Shelter Kit (Terpal 10 lbr dan Selimut 20 lbr).

- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD, juga disediakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk Cadangan pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Terdapat beberapa kegiatan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan oleh OPD dan Dunia Usaha :
 - a. Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Simulasi Gempa Bumi oleh UPT SDN 234 Kore-Korea
 - b. Simulasi Banjir oleh PT Vale Indonesia
 - c. Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bencana di Desa Tabarano Kec. Wasuponda difasilitasi oleh PT. Vale Indonesia
 - d. Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan bagi MPA bersama Manggala Agni
 - e. Diklat SAR Search & Rescue Emergency Response Team (ERT) atau Pelatihan Tanggap Darurat Berbasis Kompetensi dari Pencegahan Hingga Evakuasi dilaksanakan oleh PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).
- Terdapat pelaksanaan Mitigasi Bencana di Desa melalui Dana Desa yang dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur seperti pengadaan APAR.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat difasilitasi dengan adanya papan himbuan atau peringatan

dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbuan peringatan dini tersebut. Selain itu penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu FB, IG & Twitter yaitu [Pusdalops Bpbd Lutim](#).

- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 48 orang yang terdiri dari 14 orang PNS, CPNS 6 org, PPPK 25 org, 3 orang Upah Jasa. Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Selain itu terdapat Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB melalui Kementerian Keuangan dengan Besaran Anggaran Rp 8.587.571.000,- untuk Rekonstruksi Tanggul Banjir Sungai Desa Lauwo Kec. Burau dan Rekonstruksi Bangunan Pengaman Jembatan Desa Kawata Kec. Wasuponda.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66	0,66	100%	9.666.940.950,-	9.228.664.070.17,-	95,47%
	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	99,51%	99,51%			
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	360.284.400,-	319.771.946,-	88,76%
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	918.475.850,-	808.135.468,-	87,99%
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	8.388.180.700,-	8.100.756.656.17,-	96,57%

Tabel. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	95,47%	4,53%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,47%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 4,53%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A, Dinas Pemadam Kebekaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD, Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang bertugas untuk melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui seberapa besar ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut, beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontigenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten,

penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.

Pada tahun 2025, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana” dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu 100% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi IKD}}{\text{Target IKD}} \times 100$$

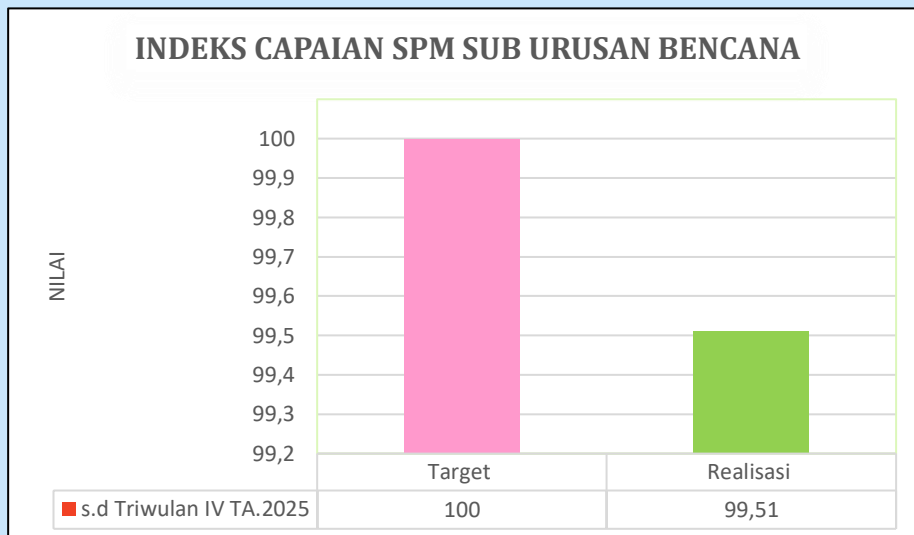
$$= \frac{0,66}{0,66} \times 100$$

$$= 100\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 9.666.940.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.228.664.070.17,- atau 95,47%.



INDIKATOR 2 : INDEKS CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA



Grafik. 7
Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana TA. 2025

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Pada periode Renstra 2025-2029, terkait Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana serta targetnya tidak mengalami perubahan masih sama dengan yang termuat dalam Renstra periode 2021-2026. Penetapan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Bencana sebesar 100% setiap tahun didasarkan pada kewajiban pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar secara maksimal, aman, dan tanpa penundaan guna mengurangi risiko serta dampak bencana. Pelayanan ini bersifat wajib dan mutlak.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)”**

Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SPM dengan **link <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>**.

Target Indikator tersebut pada Tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi 99,51% dengan persentase capaian kinerja 99,51%. Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena terdapat beberapa mutu layanan SPM yang tidak terpenuhi yaitu :

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - Tidak tersedia sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi.
- b. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Tidak tersedia sertifikat pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - Tidak tersedia assessment sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana pada pelatihan pencegahan dan mitigasi.

Mutu layanan yang tidak terpenuhi disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Adanya perubahan dalam aplikasi SPM tahun 2025, yang berbeda dengan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan sub kegiatan masih berdasarkan pengalaman pengisian mutu layanan pada tahun sebelumnya.
3. Tidak tersosialisasikannya perubahan-perubahan yang terjadi pada aplikasi SPM.

Sedangkan untuk capaian SPM Sub Urusan Bencana tahun 2025 yang terdiri dari 3 layanan adalah sebagai berikut : Layanan informasi rawan bencana dapat diberikan kepada Masyarakat melalui 3 metode yaitu : (1) Sosialisasi Secara Tatap Muka (sosialisasi langsung dengan masyarakat), (2) Sosialisasi melalui Multimedia (WA, IG, FB), (3). Sosialisasi melalui papan informasi publik/rambu bencana. Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD 3.994 org, Penyampaian informasi melalui Papan himbauan informasi bencana yang ditempatkan di 11 kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 316.000 org , dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 316.000 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya perubahan mutu layanan yang tersedia di aplikasi SPM dan berbeda dengan tahun sebelumnya sementara pelaksanaan sub kegiatan pada tahun 2025 masih mengacu kepada mutu layanan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang realisasinya fluktuatif setiap tahunnya disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Frekuensi dan Skala Bencana yang tidak dapat diprediksi;
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Alat belum merata atau terbatas;
3. Keterbatasan anggaran dan sarana/prasarana penanggulangan memengaruhi kecepatan respon;
4. Kualitas dan akurasi data, dimana masih terdapat penggunaan data yang belum berbasis pengumpulan data lapangan yang valid, sehingga penentuan target layanan menjadi tidak sesuai dengan realisasi di lapangan;
5. Adanya perubahan format pada aplikasi SPM setiap tahun;
6. Adanya perubahan mutu layanan pada SPM setiap tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 – 2029)

Sasaran 1 :	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
	Realisasi			
Indikator Kinerja 2	Tahun 2025	realisasi rata-rata sampai dengan Tahun 2025		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	99,51%	99,51%	100	99,51%

Berdasarkan realisasi rata-rata s.d Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2029, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 layanan dasar sub urusan bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbauan peringatan dini bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya Pelaksanaan kegiatan kebencanaan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan untuk Mitigasi Bencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dan yang terpenting adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini kolaborasi Pentahelix Kebencanaan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media).

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	289.984.200,-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	58.142.400,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	112.985.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	52.877.300,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	38.144.500,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	27.835.000,-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	918.475.850,-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	699.668.050,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	64.870.000,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	140.049.700,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	-	6.464.200,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	7.423.900,-	-

Tabel. 16
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1). Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2). Memaksimalkan program dan kegiatan pada OPD terkait yang menyediakan anggaran untuk Mitigasi Bencana struktural dan Non Struktural
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1). Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2). Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3). Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1). Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2). Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3). Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

❖ Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu <100% yaitu :

- Pemahaman terkait pentingnya informasi kebencanaan belum merata di masyarakat
- Terbatasnya sarana dan prasarana penyebaran informasi kebencanaan
- Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kebencanaan
- Belum optimalnya pelaksanaan simulasi dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana.
- Keterbatasan anggaran dan pendanaan
- Rendahnya kapasitas SDM
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana aksi.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Alat belum merata atau terbatas.
- Keterbatasan anggaran dan sarana/prasarana penanggulangan memengaruhi kecepatan respon.

- Kendata data yang tidak valid (Pengumpulan data sering kali tidak berbasis pada kondisi riil di lapangan, sehingga penentuan target layanan menjadi tidak akurat atau tidak sesuai hasil pelaksanaan).
- Kurangnya sinergi antara BPBD dengan instansi lain dalam penanggulangan bencana.
- Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan
- Adanya perubahan format dan mutu layanan pada aplikasi SPM setiap tahun.
- Adanya efisiensi anggaran

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan sosialisasi KIE rawan bencana melalui media sosial (FB, IG, WA) dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan Dinas PMD terkait penggunaan Dana Desa untuk Mitigasi Bencana, Dinas Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan terkait Cadangan pangan dsb.
- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi
- Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai Rencana Aksi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian Indikator kinerja 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Adanya penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Pelaksanaan Simulasi, edukasi dan pelatihan oleh Dunia Usaha dan Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan serta bantuan logistik dari dunia usaha dan Masyarakat.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja 2, juga dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, (4) Pemulihan kondisi masyarakat agar kembali normal dan membangun ketahanan yang lebih baik (*build back better*).

Pada tahun 2025 ini yang merupakan tahun transisi Periode Renstra 2025-2029 dan Periode Renstra 2021-2026, dimana Program Penanggulangan Bencana mengalami perubahan Indikator Kinerja Program yang disesuaikan dengan indikator yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 dengan Indikator sebagai berikut :

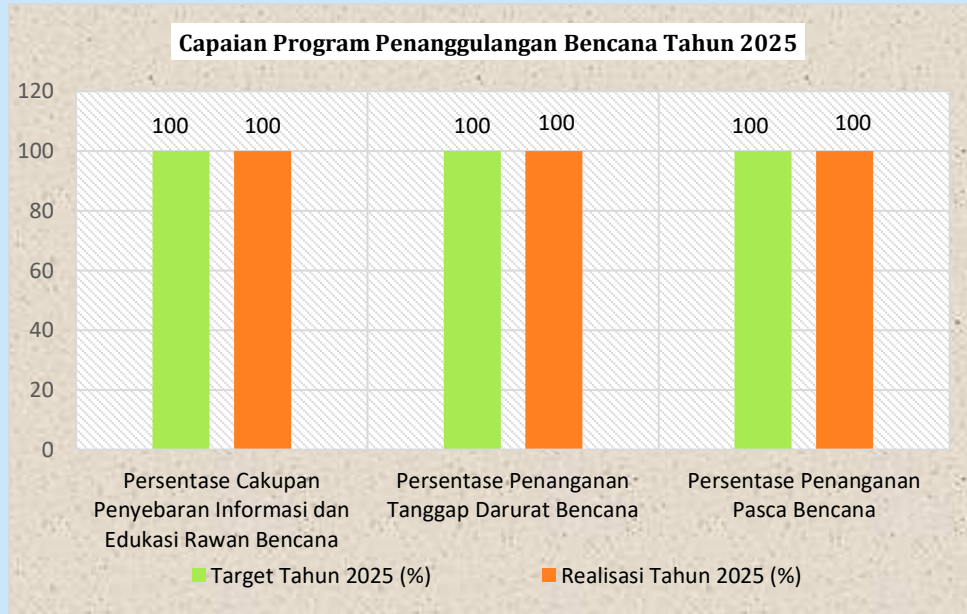
1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3. Persentase Penanganan Pasca Bencana.

Sedangkan Indikator sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender.

Pada Periode Renstra 2025-2029, terkait Indikator “Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana” perhitungannya adalah mencakup warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Sedangkan indikator “Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana”, perhitungannya berdasarkan jumlah kejadian bencana yang ditangani, akan tetapi data terkait jumlah kejadian bencana sudah termuat didalamnya terkait data warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dari setiap kejadian bencana yang terjadi. Adapun untuk indikator “Persentase Penanganan Pasca Bencana” merupakan indikator baru yang mewakili tupoksi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk penanganan pascabencana. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)



Grafik. 8

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025

- ❖ **Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025 adalah :**
 - a. **Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**

Formulasi : "Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi & edukasi dibagi jumlah total penduduk di kawasan rawan bencana dikali seratus".

$$= \frac{316.000}{316.000} \times 100$$

$$= 100\%$$

Target Tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD sebanyak 3.994 org, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan dini bencana yang ditempatkan di 11 kecamatan dengan asumsi bahwa informasi melalui papan himbauan dan rambu-rambu bencana tersebut tersampaikan keseluruhan masyarakat. Selain itu juga dilaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (4 desa) dengan asumsi jumlah penduduk yang berada di ke-4 desa tersebut sebanyak 16.796 jiwa, Pengembangan Kapasitas TRC sebanyak 48 org,

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 100 org, Gladi Kesiapsiagaan sebanyak 500 org. Dan Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan oleh Manggala Agni sebanyak TRC 3 org. Selain itu juga terdapat keberadaan EWS Gempa Bumi dan banjir yang ditempatkan di beberapa titik sudah mencakup layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Luwu Timur. Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Kec. Malili serta Alat deteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang ditempatkan di Kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur. Sehingga di asumsikan bahwa seluruh Masyarakat di 11 kecamatan memperoleh layanan informasi dan edukasi rawan bencana dengan realisasi 100% yaitu akumulasi jumlah masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 316.000 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 316.000 jiwa (database jumlah penduduk semester II Tahun 2024).

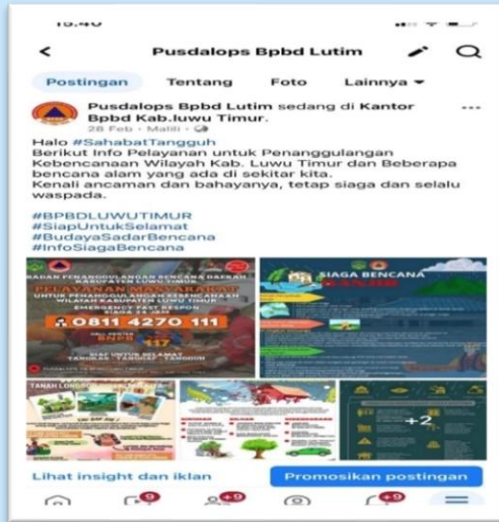
Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana



Papan Himbauan Peringatan Dini
Bencana Di Kec. Wotu



Papan Himbauan Peringatan Dini
Bencana Di Kec. Tomoni Timur



Media Sosial BPBD



Rambu Peringatan Daerah Rawan Longsor di Kec. Wasuponda



Jalur Evakuasi di Desa Laskap Kec. Malili



Rambu Rawan Longsor Kec. Angkona



Rambu Peringatan Keselamatan Pantai di Kec. Burau



Rambu Peringatan Keselamatan Pantai di Kec. Nuha



Sosialisasi KIE Rawan Bencana di Kec. Malili, tanggal 25 Agustus 2025

Dokumentasi Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana



Desa Kalpataru
Kec. Tomoni

Alat Pemantau Gempa Bumi Lokal
Kec. Tomoni



Alat Deteksi Gempa Bumi Berpotensi
Tsunami (INA Tews) di Kantor BPBD



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai
Malili



DS. Pertasi
Kec. Kalaena

Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai
Kalaena



**Pembentukan DESTANA di Desa Manunggal
Kec. Tomoni Timur, 18 September 2025**



**Pelatihan Pencegahan & Mitigasi
Malili 16 Oktober 2025**



**Pengembangan Kapasitas TRC, Malili 18 s.d
19 Desember 2025**



**Apel Siaga Bencana & Gelar Peralatan,
Malili, 29 November 2025**



Pengadaan Chainsaw dan Peralatan SAR

b. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Formulasi : “Jumlah Penanganan Tanggap Darurat Bencana dibagi Jumlah kejadian Bencana (sedang s.d Berat) dikali seratus”.

$$= \frac{636 \text{ Kejadian}}{636 \text{ Kejadian}} \times 100$$

$$= 100\%$$

Target tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa Jumlah kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2025 sebanyak 636 kejadian terdiri dari Kebakaran hutan dan lahan 7 kejadian, Kebakaran rumah 16 kejadian, Cuaca ekstrim 38 kejadian, Banjir 23 kejadian, Tanah Longsor 14 kejadian, orang hilang 8 kejadian dan gempa bumi 530 kejadian dan semua kejadian bencana dapat ditangani dengan rumus = 636 kejadian dibagi total kejadian 636 kejadian dikali 100 = 100%. Dengan jumlah korban bencana sejak bulan Januari s.d Desember 2025 sebanyak 1.848 jiwa ((934 Laki-laki dan 914 Perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi.

Dokumentasi Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana



Penanganan Longsor di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana



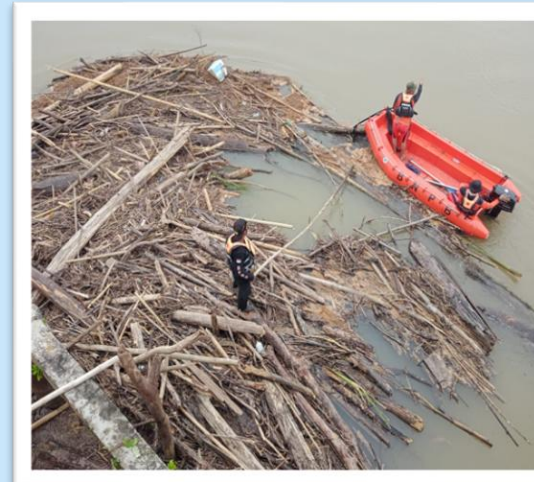
Kunjungan Bupati ke lokasi longsor



Respon Cepat Pembersihan Sungai Malili Pasca Banjir oleh TRC BPBD, DAMKAR & SAR



Respon cepat penebangan pohon di Kec. Malili, 07 April 2025



Pembersihan Sungai Malili di Kec. Malili, 08 Mei 2025



Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir di Desa Rende-Rende Kec. Wasuponda, 01 April 2025



Penanganan Kebakaran Lahan di Desa Ussu Kec. Malili 9 Juni 2025



Penyaluran Logistik Korban Bencana Kebakaran di Desa Lampenai Kec. Wotu



Penyaluran Logistik korban cuaca ekstrem di desa Nikel Kec. Nuha



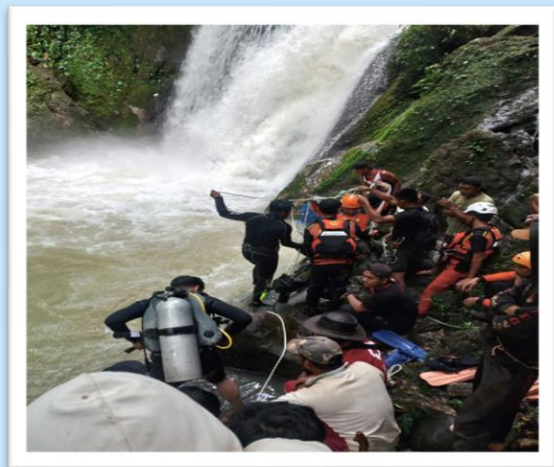
Respon Cepat Penanganan Pohon Tumbang di Kec. Malili oleh TRC-BPBD



Respon Cepat Penanganan Pohon Tumbang di Kec. Malili oleh Tim Gabungan



Assesment TRC Cuaca Ekstrim di Desa Mantadulu Kec. Angkona, 01 Nop 2025



Pencarian Orang Hilang/Tenggelam di Desa Taripa Kec. Angkona, 02 s.d 04 Nop 2025



Bantuan Korban Bencana Banjir di Desa Parumpanai Kec. Wasuponda, 02 April 2025



Penyaluran Bantuan Korban Bencana Banjir di Desa Rende-Rende Kec. Wasuponda, 06 April 2025



Penanganan Tanah Longsor di Desa Ussu Kec. Malili, 28 Juli 2025



Assesment Kejadian Banjir di Desa Lagego Kec. Burau, 11 Juli 2025

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	250 org	250 org	100%

Tabel. 17
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan (100 org)	1 Kawasan (100 org)	100%

b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1 Laporan	100%
c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	100%
d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 org	48 org	96%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 org	500 org	100%

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 19
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	141,06%	141,06%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3	3	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.310 org	1.848 org	141,06 %
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.310 org	1.848 org	141,06 %
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	1	0	0%
e.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sisitem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	1	100	100%

8. KESIMPULAN

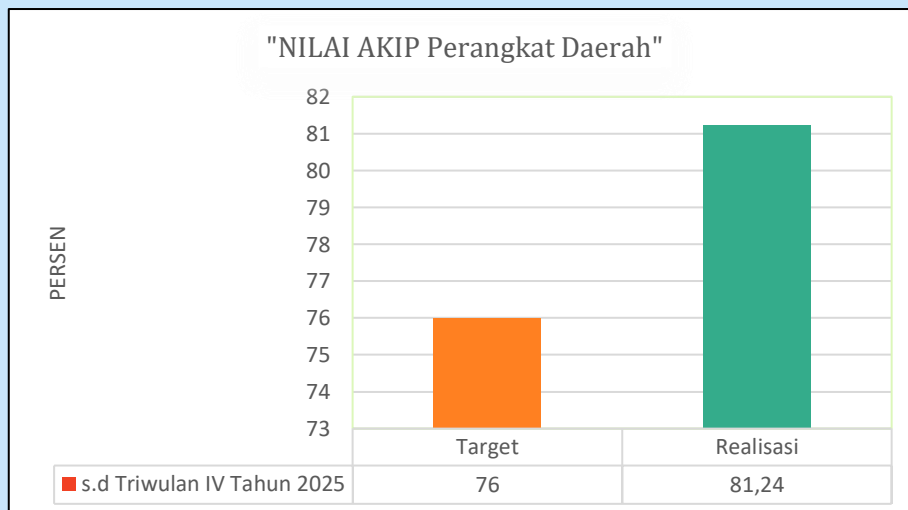
❖ Capaian Kinerja Indikator “Indeks Capaian SPM sub urusan bencana yaitu 99,51% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\
 &= \frac{99,51}{100} \times 100 \\
 &= 99,51\%
 \end{aligned}$$

❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 1.278.760.250,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1,127.907.414** atau **88,20%**.

**Sasaran 2 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

INDIKATOR : NILAI AKIP Perangkat Daerah



Grafik. 9
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran II :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Notifikasi
	Tahun 2025			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	76	81,24	106,8	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan Renstra Periode 2021-2026 dengan Renstra Periode 2025-2029, sehingga terdapat beberapa perubahan mulai dari Visi, Misi, Sasaran, Indikator maupun target kinerja. Akan tetapi terkait Indikator Kinerja Sasaran "NILAI AKIP Perangkat Daerah" masih tetap digunakan hanya target yang mengalami perubahan disesuaikan dengan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Indikator tersebut masih relevan untuk digunakan dan berfungsi sebagai alat ukur utama efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan [Permen PANRB No. 88 Tahun 2021](#), indikator ini dinilai melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal untuk mendorong kinerja berorientasi hasil.

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah "**NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat**".

Target Indikator sasaran Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 76(BB), namun belum dapat dibandingkan dengan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 karena penilaiannya dilakukan di awal tahun 2026, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan Realisasi Nilai AKIP Triwulanan Tahun 2025. Dan saat ini hanya dapat dibandingkan dengan Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025 yaitu 81,24 (A) dan menunggu pelaksanaan Penilaian AKIP Tahunan. Realisasi tersebut telah mencapai target yang direncanakan di tahun 2025. Dilakukan perubahan target karena menyesuaikan dengan target yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2025-2029 yang mengacu kepada target yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2025-2029, Dimana target Nilai AKIP Kabupaten adalah BB. Disamping itu

juga terdapat perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan oleh Tim Evaluator. Berdasarkan LHE Inspektorat, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti yaitu : Pengumpulan kinerja belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi), hasil evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan bukti yang relevan, terdapat ASN yang belum melakukan penginputan SKP serta belum menginfokan realisasi kinerja minimal 3 tahun sebelumnya. Olehnya itu akan diupayakan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel. 21
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran II :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah												Target Tahun 2025
	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	80	83,05	103,8 %	80	86	107,5 %	83,06	83,30	100,2 %	76	81,24	106,8 %	76

Catatan : Nilai AKIP TA. 2025 (Baseline Triwulan IV TA. 2025)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 belum dapat dirilis dan masih menggunakan realisasi triwulan IV TA. 2025 karena evaluasi kinerja tahunan belum terlaksana. Dengan melihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian s.d Tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tatacara penilaian oleh Tim Evaluator Inspektorat dengan menggunakan LKE yang baru. Sedangkan target pada tahun 2025 juga dilakukan perubahan mengikuti target yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2025-2029 yang tetap mengacu kepada target Nilai AKIP Kabupaten yaitu Nilai BB.

Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP Perangkat Daerah yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

- Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun sebelumnya
- Melengkapi IKU dengan defenisi operasional

- d. Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertai data dan bukti dukung yang relevan
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- f. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- g. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.
- l. Melakukan penilaian mandiri melalui aplikasi E-SAKIP Pro

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 22
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 - 2029)

Sasaran II :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2025	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2025		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,24	81,24	74,50	109,04%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Tahun 2025 yaitu 81,24 (A) menggunakan baseline LHE Triwulan IV TA. 2025. Realisasi yang melebihi melebihi target jangka menengah karena pada saat penetapan target Renstra mengacu kepada Target Nilai AKIP Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2025-2029. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menjadi rekomendasi dalam LHE hasil evaluasi Inspektorat yaitu masih terdapat ASN yang tidak melakukan penginputan SKP, belum menggunakan aplikasi dalam pengumpulan data,

rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Akan tetapi nilai tersebut masih nilai AKIP triwulanan, sehingga masih akan mengalami perubahan kedepannya setelah penilaian AKIP Tahunan oleh Tim Evaluator Inspektorat yang dilaksanakan di awal tahun berikutnya.

Namun demikian pencapaian tersebut karena adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Coaching Clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa Rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi dengan defenisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan defenisi operasional dan formulasi dsb.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
 - Kurangnya komitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan (SKP)
 - Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak mengacu kepada rencana aksi
 - Belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi dari LHE Inspektorat
- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
 - Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan/penambahan penghasilan
 - Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja
- ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait

- Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi perjalanan dinas, makan dan minum rapat, ATK, Bahan Komputer, bahan Cetak.
- b. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran II :	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	76	81,24	106,8	3.670.039.230,-	3.280.489.088,-	89,39%

Catatan : Realisasi Tahun 2025 (Baseline Triwulan IV TA. 2025)

Tabel. 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	109,04	89,39%	10,61%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,39%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 10,61%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar dengan **formulasi : Rata-rata Capaian dari jumlah kegiatan di bagi jumlah kegiatan di kali seratus** . Target 100% dan realisasi 99,01% dengan capaian kinerja 99,01%, dan menyerap anggaran sebesar 89,39%. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Misalnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang realisasinya belum sesuai target, hal ini karena adanya beberapa jabatan struktural dan fungsional yang belum terisi ASN. Begitu juga dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi disesuaikan dengan surat pemanggilan peserta. Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang realisasinya disesuaikan dengan target karena terdapat 1 unit kendaraan dinas yang tidak dapat dipelihara karena masa pinjam pakainya telah berakhir.

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 25
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Realisa si Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100%	99,01%	99,01%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	99,83%	99,83%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	3 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	10 Laporan	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100%	93,79%	93,79%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	47 Org	45 Org	95,74%

b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD n	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel.	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Lap	3 Lap	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien.	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Org	9 Org	69,23%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100 %

b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	19 Paket	95%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dok	55 Dok	91,66%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%
a.	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100%
b.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	100%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala	100%	98,50%	98,50%

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	13 Unit	92,86%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puruk Indah, Muli 92961
E-mail : lpbkabluwu@pbkd.com

Muli, 10 April 2025

Nomor : 300.2/90/BPBD
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Monitoring & Evaluasi RKPD Triwulan I TA. 2025

Yth. 1. Sekretaris BPBD
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian
4. Para Pejabat Fungsional & Staf
Lingkup BPBD masing-masing

d-
Tempat
Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.5/151/Bepitbangda tertanggal Evaluasi Triwulan I Pelaksanaan RKPD TA. 2025, maka akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Lingkup BPBD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada bapak/ibu untuk menghadiri Rapat Money Internal yang insya Allah akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 April 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KERALA PELAKSANA,
Sekretaris Badan,
Muli, Amardin, SE
NIP. : 19721231 200312 1 022

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puruk Indah, Muli 92961
E-mail : lpbkabluwu@pbkd.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : 11 April 2025
Pukul : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi RKPD Triwulan I TA. 2025

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1					
2	Amardin	L	Sekretaris		
3	Amardin	L	Kabid RR		
4	Marta Clara	P	Kabid RL		
5	Chalid Ali	L	Fungsional		
6	Amardin	L	Sub Koordinator		
7	Sahul	L	Yahya Rasyid		
8	Amardin	L	Staf		
9	Danu Azzam	P	Staf		
10	Amardin	L	Staf		
11	Chalid Ali	L	Kabid RR		
12	Amardin	L	Staf		
13	Amardin	L	Staf		
14	Amardin	L	Staf		
15					
16					
17					
18					
19					
20					



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan I TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puruk Indah, Muli 92961
E-mail : lpbkabluwu@pbkd.com

Muli, 02 Juli 2025

Nomor : 300.2/147/BPBD
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Monitoring & Evaluasi RKPD Triwulan II TA. 2025

Yth. 1. Sekretaris BPBD
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian
4. Para Pejabat Fungsional & Staf
Lingkup BPBD masing-masing

d-
Tempat
Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.5/151/Bepitbangda tertanggal 26 Juni 2025 tentang Evaluasi Triwulan II Pelaksanaan RKPD TA. 2025, maka akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Lingkup BPBD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada bapak/ibu untuk menghadiri Rapat Money Internal yang insya Allah akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KERALA PELAKSANA,
Sekretaris Badan,
Muli, M. Kes
NIP. : 19670707 200312 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puruk Indah, Muli 92961
E-mail : lpbkabluwu@pbkd.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
Pukul :
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD
Perihal : Rapat Monitoring Evaluasi TW II

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Amardin	L	Kabid RR		
2	Amardin	L	Sekretaris		
3	Amardin	L	Kabid RR		
4					
5	Sahul	L	Kabid RL		
6	Marta Clara	P	Kabid RL		
7	Amardin	L	Fungsional		
8	Amardin	L	Fungsional		
9	Amardin	L	Fungsional		
10	Amardin	L	Fungsional		
11	Amardin	L	Staf		
12	Amardin	L	Fungsional		
13	Amardin	L	Fungsional		
14	Amardin	L	Staf		
15	Amardin	L	Staf		
16	Amardin	L	Staf		
17					
18					
19					
20					



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan II TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puruk Indah, Muli 92961
E-mail : lpbkabluwu@pbkd.com

Muli, 03 Oktober 2025

Nomor : 300.2/240/BPBD
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Monitoring & Evaluasi RKPD Triwulan III TA. 2025

Yth. 1. Sekretaris BPBD
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian
4. Para Pejabat Fungsional & Staf
Lingkup BPBD masing-masing

d-
Tempat
Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.5/151/Bepitbangda tertanggal 29 September 2025 tentang Rapat Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III TA. 2025, maka akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Lingkup BPBD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada bapak/ibu untuk menghadiri Rapat Money Internal yang insya Allah akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Oktober 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KERALA PELAKSANA,
Sekretaris Badan,
Muli, M. Kes
NIP. : 19670707 200312 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puruk Indah, Muli 92961
E-mail : lpbkabluwu@pbkd.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 03 Oktober 2025
Pukul :
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD
Perihal : Monitoring Internal TW III TA. 2025

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Amardin	L	Kabid RR		
2	Amardin	L	Kabid RR		
3	Marta Clara	P	Kabid RL		
4	Chalid Ali	L	Fungsional		
5	Amardin	L	Sub Koordinator		
6	Sahul	L	Kabid RL		
7	Amardin	L	Fungsional		
8	Amardin	L	Sub Koordinator		
9	Amardin	L	Sub Koordinator		
10	Danu Azzam	P	Staf		
11	Amardin	L	Staf		
12	Amardin	L	Staf		
13	Amardin	L	Staf		
14	Amardin	L	Staf		
15	Amardin	L	Staf		
16	Amardin	L	Staf		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan III TA. 2025



Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya

7. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 106,8% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{81,24}{76} \times 100$$

$$= 106,8\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 3.670.039.230,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.280.489.088,-** atau **89,39%**.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD Perubahan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar sebesar **Rp. 13.336.980.180,-** (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilang Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.512.600.693,-**, belanja barang dan jasa **Rp. 2.286.234.187,-**, belanja hibah **Rp 10.000.000** serta belanja modal **Rp 8.528.145.300,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Sedangkan target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik. 10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel. 26
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Target TA. 2025 (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran sd 31 Desember 2025		Selisih		Total Sisa Anggaran	
				(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
					(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.336.980.180	13.336.980.180	12.509.153.158	93,79	827.827.021.83	6,21	827.827.021.83	6,21
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.670.039.230	3.670.039.230	3.280.489.088	89,39	389.550.142	10,61	389.550.142	10,61
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.606.100	113.606.100	94.999.993	83,62	18.606.107	16,38	18.606.107	16,38
	Sub Kegiatan								
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.734.700	24.734.700	20.277.592	81,98	4.457.108	18,02	4.457.108	18,02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.952.800	2.952.800	2.489.437	84,31	463.363	15,69	463.363	15,69
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.014.200	4.014.200	2.522.972	62,85	1.491.228	37,15	1.491.228	37,15
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.904.400	81.904.400	69.709.992	85,11	12.194.408	14,89	12.194.408	14,89
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.508.377.593	2.508.377.593	2.201.910.799	87,78	306.466.794	12,22	306.466.794	12,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.453.720.693	2.453.720.693	2.161.008.990	88,07	292.711.703	11,93	292.711.703	11,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54.656.900	54.656.900	40.901.809	74,83	13.755.091	25,17	13.755.091	25,17
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.745.600	20.745.600	16.981.890	81,86	3.763.710	18,14	3.763.710	18,14
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.745.600	20.745.600	9.841.890	55,93	7.753.710	18,14	7.753.710	18,14
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.501.000	44.501.000	29.186.900	65,59	15.314.100	34,41	15.314.100	34,41
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.501.000	44.501.000	29.186.900	65,59	15.314.100	34,41	15.314.100	34,41
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.365.665	399.365.665	385.920.951	96,63	13.444.714	3,37	13.444.714	3,37
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.213.000	14.213.000	13.986.000	98,40	227.000	1,60	227.000	1,60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.785.265	31.785.265	30.790.000	96,87	995.265	3,13	995.265	3,13
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.150.000	30.150.000	26.110.380	86,60	4.039.620	13,40	4.039.620	13,40
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	7.440.000	7.370.000	99,06	70.000	0,94	70.000	0,94

	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.720.000	16.720.000	13.320.000	79,67	3.400.000	20,33	3.400.000	20,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.057.400	299.057.400	294.344.571	98,42	4.712.829	1,58	4.712.829	1,58
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.800.000	221.800.000	212.581.650	95,84	9.218.350	4,16	9.218.350	4,16
	Pengadaan Mebel	45.900.000	45.900.000	39.160.800	85,32	6.739.200	14,68	6.739.200	14,68
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.900.000	175.900.000	173.420.850	98,59	2.479.150	1,41	2.479.150	1,41
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.813.272	99.813.272	97.583.741	97,77	2.229.531	2,23	2.229.531	2,23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.537.700	5.537.700	4.311.241	77,85	1.226.459	22,15	1.226.459	22,15
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.075.572	70.075.572	69.072.500	98,57	1.003.072	1,43	1.003.072	1,43
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.200.000	24.200.000	24.200.000	100	-	-	-	-
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	261.830.000	261.830.000	241.323.164	92,17	20.506.836	7,83	20.506.836	7,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.000.000	127.000.000	108.156.164	85,16	18.843.836	14,84	18.843.836	14,84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.190.000	29.190.000	28.415.000	97,34	775.000	2,26	775.000	2,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.640.000	105.640.000	107.752.000	99,16	888.000	0,84	888.000	0,84
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.666.940.950	9.666.940.950	9.228.664.070.17	95,47	438.276.879.83	4,53	438.276.879.83	4,53
9	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	70.300.200	70.300.200	61.532.105	87,53	8.768.095	12,47	8.768.095	12,47
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	70.300.200	70.300.200	61.532.105	87,53	8.768.095	12,47	8.768.095	12,47
10	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	289.984.200	289.984.200	258.239.841	89,05	31.744.359	10,95	31.744.359	10,95
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	58.142.400	58.142.400	50.870.674	87,49	7.271.726	12,51	7.271.726	12,51
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	112.985.000	112.985.000	101.875.800	70,17	11.109.200	9,83	11.109.200	9,83
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	52.877.300	52.877.300	46.718.599	88,35	6.158.701	11,65	6.158.701	11,65
	Pembangunan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	38.144.500	38.144.500	31.457.659	82,47	6.686.841	17,53	6.686.841	17,53
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	27.835.000	27.835.000	27.317.109	98,14	517.891	1,86	517.891	1,86
11	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	918.475.850	918.475.850	808.135.468	87,99	110.340.382	12,01	110.340.382	12,01
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	699.668.050	699.668.050	638.049.798	91,19	61.618.252	8,81	61.618.252	8,81
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	64.870.000	64.870.000	44.073.300	67,94	20.796.700	32,06	20.796.700	32,06

	Bencana Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	140.049.700	140.049.700	125.392.990	89,53	14.656.710	10,47	14.656.710	10,47
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	7.423.900	7.423.900	619.380	8,34	6.804.520	91,66	6.804.520	91,66
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	6.464.200	6.464.200	-	-	6.464.200	100,00	6.464.200	100,00
12	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.388.180.700	8.388.180.700	8.100.756.656.17	96,57	287.424.043.83	3,43	287.424.043.83	3,43
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	8.388.180.700	8.388.180.700	8.100.756.656.17	96,57	287.424.043.83	3,43	287.424.043.83	3,43
	Jumlah	13.336.980.180	13.336.980.180	12.509.153.158.17	93,79	827.827.021.183	6,21	827.827.021.183	6,21

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran Tahun 2025**

Tabel.27
Permasalahan dan Solusi

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen yaitu renja pokok 2026, renja perubahan 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan realisasi 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 24.734.700- dan realisasi anggaran Rp.20.277.592 atau sebesar 81.98%.Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Terdapat sisa belanja e-Catalog sebesar RP.1.311.108. Terdapat sisa belanja makan minum rapat yang cukup besar karena beberapa kegiatan rapat yang dilaksanakan sekaligus membahas beberapa kegiatan lainnya.	PPTK untuk mencermati sisa belanja e-catalog dan makan minum pada saat perubahan anggaran

1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen yaitu RKA Perubahan TA.2025 dan RKA TA.2026 dengan realisasi 100%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.2.952.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.489.437 atau sebesar 84.31%. Realisasi tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 463.363.	PPTK untuk mencermati sisa belanja e-catalog
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen DPA-SKPD TA. 2025 dan DPA Perubahan TA.2025 dengan realisasi kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 4.014.200,- dan realisasi keuangan s.d TW IV sebesar Rp. 2.522.972 atau 62.85% karena terdapat sisa belanja E-Catalog Rp. 62.500. untuk belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 1.428.728 disesuaikan dengan jumlah dokumen yang akan digandakan sesuai kebutuhan kantor.	PPTK untuk mencermati sisa belanja e-catalog
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 100%. Dokumen yang disusun yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Laporan Evaluasi TW I, Laporan Evaluasi TW II, Laporan Evaluasi TW III, Laporan RKPD TW I, Laporan RKPD TW II dan laporan RKPD TW III dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp. 81.904.400 dengan Realisasi keuangan s.d TW IV Sebesar Rp.69.709.992 atau sebesar 85.11 % tidak mencapai target karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 1.943.558 . terdapat belanja cetak Rp.2.477.350 yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor. untuk belanja sewa gedung bangunan Rp. 1.500.000 tidak teralisasi karena kegiatan FGD IKD dilaksanakan di Aula Sasana Praja Kab.Luwu Timur, Sedangkan untuk anggaran perjalanan dinas, penggunaannya disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan yang terkait.	PPTK untuk mencermati sisa belanja e-catalog dan belanja-belanja yang tidak digunakan pada saat perubahan anggaran.
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 47 org dan realisasi pada triwulan IV hanya 45 org sehingga capaian kinerja 95.74 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan yang belum terisi ASN	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 2.435.720.693,- dan realisasi Rp 2.161.008.990,- atau sebesar 88.07%. dari target 100%. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena masih terdapat jabatan yang belum terisi sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan.	PPTK tetap mencermati perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dan PPPK
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Target sampai dengan triwulan IV sebanyak 18 dokumen dan realisasi sebanyak 18 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2024 sebanyak 1 dok,Laporan triwulan IV 1 dokumen laporan bulanan bendahara tw IV 3 dokumen, Laporan Triwulan 1 dok, Laporan Bulanan Bendahara 3 dok,laporan Bulanan bendahara TW II sebanyak 3 dok , Laporan Triwulan II sebanyak 1 dokumen dan laporan semesteran 1, Laporan bendahara triwulan III sebanyak 3 dokumen, laporan triwulan III sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 54.656.900,-, dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 40.901.809- atau sebesar 74.83%. Realisasi keuangan tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 308.073 untuk Belanja Cetak Rp.375.000 di sesuaikan dengan kebutuhan kantor. Untuk Belanja Makan Minum Rapat Rp.2.400.000 kegiatan rapat dilaksanakan diwaktu yang sama dengan kegiatan lain .Sedangkan untuk anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.9.120.500, tidak terealisasi karena disediakan untuk kegiatan rekon pajak, namun tertunda pelaksanaannya, sehingga anggaran tersebut tidak digunakan	PPTK untuk mencermati sisa belanja e-catalog dan makan minum pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 20.745.600,-Dan Realisasi sebesar Rp.16.981.890 atau sebesar 81.86%. Realisasi keuangan tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja jasa pengelola BMD Rp. 1.300.000 karena adanya SK perubahan besaran honorarium pengelola BMD yang diberlakukan mulai bulan november 2025. Sedangkan untuk belanja cetak Rp. 670.000 tidak terealisasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan kantor. Demikian halnya dengan belanja perjalanan dinas Rp. 1.533.000, dimana penggunaan anggaran disesuaikan dengan surat/ undangan yang terkait.	PPTK untuk mencermati sisa belanja e-catalog
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, target sampai dengan triwulan IV sebanyak 13 orang, dan terealisasi sebanyak 8 orang atau sebesar 61.53%. Pelaksanaan bimtek berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta diklat atau bimtek.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 44.501.000,- dan realisasi keuangan s.d TW IV sebesar Rp.29.186.900 atau sebesar 65.59%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan undangan/pemanggilan peserta diklat atau bimtek	PPTK mencermati realisasi belanja pada saat perubahan belanja
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 8 paket per triwulan . Dan realisasi triwulan IV TA. 2025 Sebanyak 8 jenis atau 100%. Penyediaan komponen instalasi litrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 14.213.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.13.986.000 atau sebesar 98.40%. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Agar PPTK tetap mencermati kebutuhan alat listrik untuk kebutuhan kantor
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 paket setiap triwulan, dan untuk triwulan IV terealisasi 19 jenis yaitu BBM operasional 1 jenis dan pengadaan bahan logistik sebanyak 18 jenis dengan realisasi kinerja 94,73%	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 31.785.265,- dan Realisasi keuangan Rp 30.790.000,- atau sebesar 96.87%. Realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini karena penggunaan anggaran BBM disesuaikan dengan kebutuhan dan mobilitas penggunaan kendaraan dinas. Sedangkan untuk belanja bahan kebersihan kantor pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 30.150.000 dan realisasi keuangan s.d TW IV sebesar Rp.26.110.380 atau sebesar 86.60%.Dimana penggunaan anggaran untuk belanja cetak spanduk dan baliho disesuaikan dengan kebutuhan kantor	PPTK mencermati realisasi belanja pada saat perubahan belanja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, target s.d triwulan triwulan IV sebanyak 60 dokumen dan realisasi 55 dokumen yaitu koran lokal 33 dokumen, koran nasional 11 dokumen, koran regional 11 dokumen dengan capaian kinerja 91,67%.	Disediakan anggaran kas triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 7.440.000,- dan realisasi keuangan Rp 7.370.000,- atau sebesar 99.06%.Terdapat kenaikan harga bahan bacaan, sehingga realisasinya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.	Agar PPTK mencermati penyesuaian kenaikan harga setiap bahan bacaan

1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, dan target triwulan IV sebanyak 1 laporan dengan realisasi 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 16.700.000 dan Realisasi keuangan s.d TW IV sebesar Rp.13.320.000 atau sebesar 79.67%. Tidak mencapai target karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan jumlah kunjungan tamu ke kantor.	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, target s.d triwulan IV sebanyak 1 laporan dengan realisasi 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 299.057.400,- dan realisasi keuangan Rp 294.344.571 atau sebesar 98.42%. Penggunaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan. Dan terdapat sisa anggaran belanja jasa sopir karena pembayarannya disesuaikan dengan masa berlaku SK Sopir (sopir pengganti)	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 16 unit yaitu filling kabinet 1 unit, lemari penyimpanan 2 pintu 1 unit, lemari penyimpanan kecil 1 unit, kursi sofa 1 unit, kursi kerja pejabat eselon IV 2 unit dan kursi kerja staf 10 unit dengan realisasi 100%.	Disediakan Anggaran kas s.d TW IV TA. 2025 sebesar Rp.45.900.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.160.800 atau sebesar 85.31 % tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 6.739.200.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 15 unit yaitu Speaker aktif 1 unit, camera 1 unit, PC 4 unit, laptop 4 unit dan printer 5 unit dan realisasi sebesar 100%.	Disediakan anggaran kas s.d TW IV TA. 2025 sebesar Rp.175.900.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.173.420.850 atau sebesar 98.59% tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 2.479.150.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dan target sebanyak 1 laporan dengan realisasi 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 5.537.700,- Realisasi keuangan s.d TW IV adalah Rp.4.311.241 atau sebesar 77.65% tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog Rp.1.076.459 dan belanja paket/pengiriman Sebesar Rp.150.000, yang penggunaan anggarannya di sesuaikan dengan kebutuhan kantor	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya daya air dan listrik yang disediakan, dan target sebanyak 1 laporan dengan realisasi 100%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 70.075.572,- dan terealisasi Rp 69.072.500 atau sebesar 98.57%. Realisasi tidak mencapai target 100% karena pada dasarnya penggunaan anggaran belanja bersifat Riil Cost	Agar PPTK mencermati kebutuhan terkait jasa komunikasi SDA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan target sebanyak 1 laporan dengan realisasi sebesar 100%	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 24.200.000,-. Dengan realisasi keuangan 100%	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 14 unit setiap triwulan dan realisasi triwulan IV sebanyak 13 unit yaitu kendaraan DD 8170 G, DD 8152 G, DD 8102 G, DD 8153 G, DD 9154 DP, DD 6985 G, DP 6983 G, DP 6984 G, DP 6986 G, DP 6987 G, B 6212 TQE, B 6112 TQE dengan dengan capaian sebesar 92,85%. Capaian kurang dari target disebabkan karena pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 127.000.000,- dan Realisasi keuangan Rp. 108.156.164 atau sebesar 85.16% tidak mencapai target 100%. karena terdapat 1 unit kendaraan dinas yang tidak dapat dipelihara karena masa berlaku acara pinjam pakainya sudah berakhir.Pada dasarnya anggaran yang digunakan disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai dan penyelesaian berita acara pinjam pakai kendaraan.
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 51 unit dan terealisasi 51 unit yaitu 8 unit lebtop, 12 unit printer, 3 unit komputer, AC 9 unit, cainsaw 9 unit, mesin babat 2 unit dan tenda 1 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 29.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.415.000 atau 97.34%. Pada dasarnya Penggunaan anggaran di dasarkan pada kondisi peralatan kantor yang dipelihara.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi peralatan kantor yang memerlukan pemeliharaan.
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi sebanyak 2 unit dengan realisasi sebanyak 2 unit atau 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 105.640.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.104.752.000 atau 99.16%. Penggunaan anggaran di sesuaikan dengan kondisi gedung dan bangunan yang akan di pelihara.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan.
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun dengan target 250 org. kegiatan telah terealisasi dengan menghadirkan pelajar tingkat SMP dan SMA Se-kecamatan Malili pada tanggal 25 Agustus 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan inovasi juga telah terealisasi, dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparat desa terkait, bagian hukum dan BKAD serta Bank SulSelbar pada tanggal 22 desember 2025 di Aula Sasana Praja Kab.Luwu Timur. Realisasi kegiatan 100%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.70.300.200 dengan realisasi sebesar Rp. 61.532.105 atau sebesar 87.53% tidak mencapai target 100% kerana terdapat sisa belanja e-catalog Rp.2.521.891. untuk belanja jasa tenaga informasi Rp.2.500.000 tidak terealisasi karena sudah inklude dalam honor tenaga ahli yang dibayarkan. Terdapat belanja sewa hotel Rp.1.350.000 tidak terealisasi karena narasumber inovasi berada di Kec.Malili Kab.Luwu Timur , sedangkan untuk anggaran perjalanan dinas Rp.2.316.450 disesuaikan dengan surat/ undangan kegiatan atau sesuai kebutuhan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan target 1 kawasan. Kegiatan telah dilaksanakan dengan menghadirkan kepala desa, kepala dusun, dan lurah Sekecamatan Malili pada tanggal 16 oktober 2025 di Aulah Dinas Pendidikan kab.Luwu Timur. Realisasi kegiatan 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.58.142.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.50.870.674 atau sebesar 87,49%. Terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 1.743.726, sedangkan untuk belanja perjalanan dinas Rp.4.028.000 disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalop) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya dengan target kegiatan 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan atau realisasi 100%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp. 112.985.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.101.875.800 atau 90,17%. tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog Rp.1.109.200. sedangkan untuk belanja hibah uang yang ditujukan kepada Brimob Baebunta kab.Luwu Utara sebesar Rp. 10.000.000 tidak terealisasi di karenakan adanya kekurangan berkas yang tidak dipenuhi.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan target 4 kawasan (100%). Realisasi kegiatan yaitu Pembentukan Destana di Desa Mahalona Kec. Towuti, Desa Sorowako Kec. Nuha, Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur dan Desa Balirejo Kec. Angkona pada tanggal 15 s.d 19 September 2025,	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.52.877.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.46.718.599 atau sebesar 88,35%. Realisasi tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 452.401. untuk belanja honorarium narasumber Rp.2.250.000 tidak terealisasi karena hanya terbayarkan 50% dari honorarium narasumber yang berasal dari internal OPD.sedangkan untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 3.316.300 di sesuaikan dengan surat/undangan kegiatan	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah personil tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana dengan target 50 orang dan realisasi 48 org (96%). Kegiatan telah dilaksanakan dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 47 orang pada tanggal 18 s.d 19 desember 2025 di Aulah Hotel Golden House Malili dan Ruang Rapat BPBD.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp. 38.144.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.457.659 atau 82,47%. Relaisasi tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog Rp.1.532.841. Terdapat sisa belanja makan minum Rp.3.890.000 tidak terealisasi karena pada walnya direncanakan makan minum 2 kali namun terealisasi hanya 1 kali. sedangkan untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp.1.264.000 di sesuaikan dengan surat/undangan kegiatan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektifitas SOP dan keberfungsian saran prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 500 Orang dan realisasi 100%.. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2025 di Bundaran Batara Guru Kab.Luwu Timur.	Disediakan anggaran kas triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.27.835.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.317.109 atau sebesar 98,14%. Tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog Rp.517.891.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			

1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen yaitu SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, SK Penetapan Status Penanganan Darurat Bencana Kebocoran Pipa Minyak PT.Vale di Desa Lioka kec.Towuti , dan SK Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran di Desa Sorowako Kec.Nuha, dengan realisasi 100%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 699.668.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.638.049.798,- atau sebesar 91.19%. Realisasi tidak mencapai target 100% karena terdapat sisa belanja BBM Rp.11.155.700 karena di sesuaikan dengan kegiatan kantor,terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. 215.805, untuk anggaran belanja PPPK paruh waktu Rp. 6.000.000 tidak terealisasi karena anggaran sifatnya disediakan untuk 1 orang upah jasa TRC namun tidak TRC tersebut tidak terakomodir menjadi PPPK Paruh waktu. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 9.517.747 disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan.	
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana dengan target 1848 orang. Adapun realisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 1848 jiwa (934 laki-laki dan 914 perempuan), dengan realisasi 141%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 64.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp 44.073.300,- atau sebesar Rp. 67.94%. Tidak terealisasi 100% karena beberapa kejadian pencarian korban cepat ditemukan sehingga tidak menggunakan anggaran yang besar untuk setiap kejadian. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana.	PPTK mencermati kebutuhan anggaran pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 1.310 orang. dan terealisasi 1848 jiwa atau 141%. terdiri atas Laki-laki 934 jiwa dan perempuan 914 jiwa semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 140.049.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 125.392.990.atau sebesar 89.53% . Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp.241.330. sedangkan untuk sisa belanja persediaan untuk tujuan strategis sebesar Rp.3.165.000 tidak terealisasi karena adanya bantuan logistik dari provinsi.Untuk belanja paket pengiriman Rp.5.000.000 dan belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya Rp.4.500.000 tidak terealisasi karena logistik yang berada di provinsi disalurkan langsung oleh pemerintah Provinsi ke BPBD Kab.Luwu Timur . Untuk belanja perjalanan dinas Rp.1.750.380 di sesuaikan dengan surat/undangan kegiatan.	PPTK mencermati belanja-belanja yang difasilitasi oleh BPBD provinsi untuk antisipasi SILPA akhir tahun
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sisitem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 laporan dengan realisasi 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 7.423.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 619.380 atau 8.34%. Realisasi keuangan sangat rendah karena anggaran ini bersifat disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana berskala besar atau kejadian bencana yang membutuhkan sistem komando penanganan darurat bencana	PPTK tetap membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan kejadian bencana
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan dengan target 1 Dokumen. Realisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 0 dokumen atau 0%. Hal ini dikarenakan s.d Desember 2025, tidak ada kejadian wabah/epidemi atau laporan masyarakat kepada TRC BPBD terkait kejadian bencana non alam epidemi/wabah penyakit.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 6.464.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya atau kejadian bencana akibat gagal teknologi.	PPTK tetap membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan kejadian bencana
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			

1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/kota yang dilegalkan dengan target 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan (100%).	Disediakan anggaran sampai dengan Triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 8.388.180,700,- dan Realisasi keuangan Rp 8.100.756.656,17,- atau sebesar 96,57%. Terdapat sisa anggaran pada Belanja ATK, Kertas Cover, Bahan Komputer, dan Makan Minum Rapat yang merupakan hasil nego dengan penyedia di E-Catalog Inaproc	PPTK mencermati sisa anggaran dari Dana Hibah RR yang kemungkinan harus dikembalikan ke kas Negara
---	----	----	------	----	---	--	---	--

3.4 Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Kinerja Sasaran OPD

Dalam pencapaian kinerja sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dilakukan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor : 421/F-01/XII/Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Angin Kencang, Banjir, Tanah Longsor, dan Abrasi di Kabupaten Luwu Timur. SK tersebut dibuat sebagai Upaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan terjadinya bencana sesuai dengan analisa data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dimana cuaca atau kondisi alam sangat ekstrim yang berpotensi terjadinya bencana alam Hidrometeorologi Basah, yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan harta benda, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah.
2. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor 112/F-01/III/Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir. SK ini dibuat untuk mengakomodir kejadian banjir di Desa Alam Buana Kec. Tomoni Timur.
3. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor 275/F-01/VIII/Tahun 2025 tentang Penetapan Status Penanganan Darurat Bencana Kebocoran Pipa Minyak PT. Vale Indonesia Tbk. Soroako di Dusun Malindowe Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. SK ini dibuat untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat kebocoran pipa terhadap Kesehatan Masyarakat dan dampak pada lingkungan khususnya pada aliran irigasi dan aliran Sungai yang akan bermuara pada hilir danau Towuti.
4. Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui Media Sosial (Facebook, WAG, Instagram Pusdalops BPBD)
5. Penerapan Aplikasi SIAGA BENCANA untuk percepatan Pelayanan Pasca Bencana Penyaluran Dana BTT untuk korban bencana.
6. Pembentukan Group WA "PEDULI DESA" untuk mempermudah pelaporan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dimana

group tersebut beranggotakan seluruh kepala desa dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi sebagai upaya untuk percepatan penanganan bencana sampai ditingkat desa.

7. Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan di 11 Kecamatan Se-Kab. Luwu Timur.

3.5 Pencapaian Kinerja mempengaruhi Budaya Kerja Organisasi

Budaya kerja merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebab suatu organisasi mungkin tidak akan berjalan baik, tanpa didasari dengan budaya kerja yang jelas. Oleh suatu organisasi, budaya kerja merupakan perihal wajib untuk dipertimbangkan sebab hal tersebut terkait dengan interaksi antara pegawai satu dengan yang lain. Hal tersebut pun berkontribusi besar akan kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Kuatnya budaya kerja nampak dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin baik produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur negara.

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai. Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal.

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal Pencapaian kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memengaruhi budaya kerja organisasi, yang terlihat dari beberapa hal seperti motivasi, kepuasan kerja, dan kolaborasi antarpegawai:

- a. Sebagai contoh, untuk pencapaian target kinerja Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dengan Indikator

“Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” target pada tahun 2025 adalah 0,66 dengan predikat sedang dan lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Dan untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi, koordinasi, motivasi dan komitmen bersama. Dan ini menjadi tantangan bagi ASN BPBD dan OPD terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan diawal tahun.

- b. Pencapaian target kinerja Indikator “Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana pada Triwulan IV Tahun 2025 sudah mencapai 95,51%. Bilamana pengukuran capaian SPM hanya berdasarkan anggaran yang tersedia melalui DPA-SKPD BPBD TA. 2025, maka sangat berat untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh BPBD untuk berkoordinasi lintas sektoral dan berkolaborasi maka SPM tersebut dapat terpenuhi.

c. Hubungan Budaya Kerja “BERAKHLAK” terhadap pencapaian kinerja yaitu

:

➤ Berorientasi Pelayanan

Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemberian bantuan logistik untuk korban bencana dan hal ini juga berkaitan dengan Tupoksi BPBD.

➤ Akuntabel

Mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan, menolak bentuk gratifikasi dalam melakukan pelayanan kemanusiaan untuk korban bencana. Membantu korban bencana dengan Ikhlas dan penuh tanggungjawab.

➤ Kompeten

Meningkatkan diri dengan terus belajar. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya peningkatan kapasitas bagi TRC-BPBD, keikutsertaan dalam berbagai diklat teknis kebencanaan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi Tim penanggulangan bencana.

➤ Harmonis

ASN menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan

kemanusiaan yang diberikan untuk menolong korban bencana. Hal lainnya adalah berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika terbukti dalam pelaksanaan Rapat Monev Internal lingkup OPD.

➤ Loyal

Berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari perilaku bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi/OPD.

➤ Adaptif

ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta proaktif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengembangan Inovasi di BPBD seperti Penerapan Aplikasi SIAGA Bencana, PEDULI DESA yang merupakan upaya untuk percepatan penanganan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

➤ Kolaboratif

Saling bersinergi dan bekerja sama, terlihat dengan adanya keterlibatan OPD terkait, Instansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ini berarti bahwa memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Hal lainnya adalah melakukan Kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama lintas OPD terkait dan Vertikal dalam penanganan bencana, misalnya Kerjasama BPBD dengan BMKG Wilayah IV Makassar tentang Pemanfaatan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Kerjasama BPBD dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk pemenuhan Cadangan pangan untuk korban bencana dsb



BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja BPBD Tahun 2025 ini merupakan dokumen krusial yang menjembatani akhir periode Renstra 2021-2026 dan awal implementasi Renstra 2025-2029. Tahun ini berfokus pada penyelesaian target strategis sebelumnya, sekaligus melakukan sinkronisasi program dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan arah kebijakan pembangunan baru, guna memastikan keberlanjutan dan akselerasi pencapaian kinerja pelayanan publik yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 12.509.153.158,17,- (93,79%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.161.008.990,- (17,27%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.116.114.089,- (16,46%), Belanja Hibah Rp 0,- (0%) serta Belanja Modal Rp 8.232.030.079,17,- (65,81%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I Indikator 1 yaitu indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2025 sebesar **100%** dengan ***predikat BAIK***.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I Indikator 2 yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2025 sebesar **100%** dengan realisasi **99,51% predikat Baik**
- d. Persentase Capaian Kinerja sasaran II (sasaran pendukung) yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2025 sebesar **106,8%**, dengan ***predikat BAIK***.
- e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 100%
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%
- f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2025 terhadap beberapa target sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
- Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak sesuai rencana aksi
 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
- g. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
 - Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
 - Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program diakhir tahun
 - Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun transisi perencanaan. Evaluasi ini menjadi pijakan penting untuk menjembatani capaian strategis dari Renstra 2021-2026 menuju arah kebijakan yang lebih tajam dan inovatif pada Renstra 2025-2029. Dengan harapan bahwa melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya. Kami optimistis, melalui peningkatan kinerja dan penyesuaian strategi ini, kita dapat mewujudkan tujuan jangka menengah yang lebih berdampak positif bagi masyarakat. Terima kasih atas dedikasi seluruh pihak, dan kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan agenda strategis di periode selanjutnya.

Malili, 07 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jl. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE KEMENPAN-RB TAHUN 2024

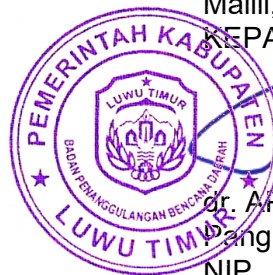
**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Data Dukung
1	2	3			4
1.	Mereviu kembali perencanaan kinerja pada tingkat PD secara menyeluruh untuk memastikan seluruh sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup sehingga dapat menjawab kinerja utama PD.	Telah dilakukan reviu perencanaan kinerja dan dipastikan bahwa sasaran strategi BPBD telah berorientasi hasil (outcome) dengan indikator yang SMART. Sasaran Strategis BPBD adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dengan Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Sasaran tersebut mengacu kepada sasaran strategis Kepala Daerah yaitu Menurunkan Risiko Bencana Daerah dengan Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Jika IKD naik maka Nilai IRB akan menurun. (Dokumen Renstra & IKU BPBD 2021-2026)	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1FCJJeOy_WvkWX5j32FPDsX2i6qBFi0JP?usp=sharing
2.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja seluruh PD dan memastikan penjenjangan kinerja telah mampu mengidentifikasi kinerja crosscutting. Hal ini untuk memastikan koordinasi antar PD sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.	Bahwa penjenjangan kinerja telah mengidentifikasi kinerja Crosscutting didalamnya sehingga terlihat koordinasi antar PD dalam pencapaian kinerja. (Pohon Kinerja BPBD 2021-2026 dan Penjelasan Crosscutting Lintas OPD)	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1IVVw90HerDPGjpARjEnKvfPkABwHO3GH?usp=sharing
3.	Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan diikuti dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang jelas dan relevan. Hal ini untuk memastikan pengukuran kinerja yang dilakukan telah disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran kinerja dapat diandalkan.	Bahwa setiap indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Eselon II, III & IV Tahun 2024 dan 2025.	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1hOpP8iZpnmqS0WuzZSTOqATKr9oSLhQ?usp=sharing

4.	Agar terus meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat PD dan melengkapi perbandingan capaian kinerja baik tingkat Pemda maupun PD terhadap daerah lain atau nasional yang dapat dibandingkan. Hal ini untuk melihat kemajuan Pembangunan daerah secara regional atau nasional.	Bahwa dalam Dokumen Laporan Kinerja BPBD Tahun 2024, telah memuat perbandingan capaian kinerja terhadap daerah lain/provinsi yang dapat dilihat pada Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Sedangkan terhadap nasional yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana, Dimana target nasional adalah 100% setiap tahun. (BAB III, Akuntabilitas Kinerja, hal.23,24 & 39 LAPKIN BPBD Tahun 2024).	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1gjHZrPHXyNR4BxKEwRhNsoH0oYDXtygP?usp=sharing
5.	Agar terus mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan masukan dalam perencanaan kinerja selanjutnya baik dalam penentuan target agar lebih menantang dan realistis maupun dalam penentuan strategi yang akan diputuskan agar lebih tepat dalam mendorong kinerja yang telah ditetapkan.	Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perencanaan kinerja selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan penentuan target setiap tahunnya mengacu kepada realisasi tahun sebelumnya atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. (Dapat dilihat pada Dokumen PK Eselon II Tahun 2025 dan Matriks Sandingan Renstra & PK Tahun 2025).	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-8AIJ9uJJrEK Cwxd3RV89j2DrYSPHSg7?usp=sharing
6.	Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap PD dengan memastikan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya memperbaiki dokumen perencanaan, namun mampu mendorong perbaikan pada pelaksanaan program dan kegiatan PD.	Bahwa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh OPD dan terlampir pada Dokumen Laporan Kinerja BPBD Tahun 2024. (Matriks Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024)	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1QpEV9rggM9Jk7nOkYVsk4tU-7PkcVr7?usp=sharing

Malili, 18 Maret 2025

KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670707 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jl. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE AKIP TRIWULAN II & III TAHUN 2025

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Mengoptimalkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sehingga target kinerja tercapai dengan baik.	Bahwa OPD telah melakukan beberapa efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja OPD (Dokumen Lapkin Triwulan IV TA. 2025 Hal.9 dan 44)	Selesai
2.	Melaksanakan evaluasi mandiri pada Tingkat OPD untuk triwulan III & IV.	Bahwa OPD telah melakukan evaluasi Mandiri untuk triwulan IV TA. 2025 dengan menggunakan aplikasi E-SAKIP Pro	Selesai
3.	Melibatkan seluruh pegawai dalam menetapkan perencanaan kinerja sehingga semua pegawai peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan (SKP).	Seluruh pegawai telah terlibat dalam menetapkan perencanaan kinerja sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan SKP masing-masing ASN.	Selesai

Malili, 07 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670707 200012 1 002

